

Analisis Garis Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Gini Ratio, Inflasi, GDP, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Tahun 2010-2023

¹Damai Puti D, ²Salsabila Nurmasanti, ³Syifa Ramadhani P, ⁴Windy Pradina R

¹Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: ¹b300230141@student.ums.ac.id, ²b3002300108@student.ums.ac.id,
³b300230111@student.ums.ac.id, ⁴b3002030139@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika garis kemiskinan di Indonesia (2010–2023) dengan mempertimbangkan indikator makroekonomi: Gini Ratio, inflasi, GDP, pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi (UMP). Menggunakan data dari BPS dan Bank Dunia serta metode regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa Gini Ratio dan pengangguran terbuka meningkatkan garis kemiskinan secara signifikan, sementara GDP dan UMP menurunkannya. Inflasi berpengaruh positif namun tidak selalu signifikan, mencerminkan dampaknya yang kompleks pada daya beli rumah tangga miskin. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan memperkuat perlindungan sosial.

Kata kunci : *Garis Kemiskinan, Gini Ratio, GDP, Pengangguran Terbuka*

ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of the poverty line in Indonesia from 2010 to 2023, considering key macroeconomic indicators: the Gini Ratio, inflation, GDP, open unemployment rate, and provincial minimum wage (UMP). Using secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and the World Bank, and employing multiple linear regression, the results show that the Gini Ratio and open unemployment significantly increase the poverty line, while GDP and UMP reduce it. Inflation has a positive but not consistently significant effect, reflecting its complex impact on the purchasing power of poor households. The findings highlight the need for policies that not only promote economic growth but also reduce inequality and strengthen social protection.

Keyword : *Poverty Line, Gini Ratio, GDP, Open Unemployment*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah dan pemangku kebijakan di Indonesia terus menghadapi tantangan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan nasional. Meskipun perekonomian Indonesia secara agregat menunjukkan pertumbuhan yang relatif konsisten selama beberapa dekade, laju penurunan Garis Kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Hambatan struktural seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, serta karakteristik pertumbuhan ekonomi apakah inklusif atau tidak menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pembangunan pro-kemiskinan (Ausloos et al., 2019).

Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan relatif di Indonesia telah menunjukkan penurunan secara umum dari dekade 2010-an hingga awal 2020-an. Berdasarkan kompilasi data untuk periode terbaru, misalnya periode 2019–2024, proporsi penduduk miskin (kemiskinan relatif) tercatat sebagai berikut: 9.22% pada 2019, naik menjadi 10.19% pada 2020, kemudian menurun sedikit ke 9.71% (2021), 9.57% (2022), 9.36% (2023) dan 9.03% (2024). Dalam hal jumlah absolut, penduduk miskin tercatat sekitar 24,78 juta pada 2019, meningkat menjadi sekitar 27,55 juta pada 2020, kemudian berkurang menjadi 25,22 juta pada 2024.

Pada saat bersamaan, ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio menunjukkan variasi. Misalnya, data untuk tahun 2023 menunjukkan Gini Ratio sebesar 0,388, meningkat dibandingkan 0,381 pada September 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Garis Kemiskinan menurun relatif, ketimpangan pendapatan dapat meningkat, yang berimplikasi pada distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Loayza & Raddatz, 2010).

Fenomena ini mencerminkan tesis dalam literatur bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin penurunan kemiskinan jika tidak disertai distribusi pendapatan yang adil (inklusif) (Ivanic & Martin, 2008)

Variabel lain yang memiliki peran penting dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat adalah inflasi khususnya inflasi harga konsumen. Stabilitas harga memengaruhi daya beli rumah tangga, terutama bagi mereka yang berada di ambang garis kemiskinan atau di bawahnya. Data resmi dari BPS menunjukkan bahwa inflasi umum nasional (CPI) dipublikasikan secara berkala; misalnya, inflasi bulanan dan tahunan tersedia untuk periode 2006–2023 (Fosu, 2010)

Ketika inflasi meningkat, terutama pada komoditas kebutuhan pokok, rumah tangga miskin bisa sangat rentan karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar relatif besar. Literatur ekonomi pembangunan menekankan bahwa inflasi dapat menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan jika upah dan pendapatan tidak ikut naik proporsional (Easterly & Fischer, 2001)

Sebagai indikator makro, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Untuk Indonesia, data historis menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB tahunan (full-year) relatif stabil setelah krisis finansial global dan krisis akibat pandemi. Misalnya, menurut catatan data, PDB Indonesia tumbuh 5,31% pada 2022; meskipun mengalami fluktuasi, rata-rata pertumbuhan dalam satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan positif. (Dollar & Kraay, 2002)

Karakteristik dari pertumbuhan tersebut sektor mana yang mendorongnya, apakah padat karya atau padat modal, serta distribusi manfaatnya menentukan apakah pertumbuhan tersebut benar-benar inklusif dan dapat menurunkan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia,

terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan di sektor industri manufaktur tidak selalu diiringi peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional, sehingga kontribusi terhadap penurunan kemiskinan menjadi terbatas (Deininger & Squire, 1998).

Kemiskinan adalah masalah pembangunan yang terus dihadapi oleh Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonomi negara menunjukkan arah yang baik, penurunan angka kemiskinan tidak selalu sebanding dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya merata (David Dollar & Kraay, 2002).

Garis Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti garis kemiskinan (GK), ketimpangan pendapatan (Gini Ratio/GR), inflasi (INF), dan pertumbuhan ekonomi (GDP) (Fosu, 2010). Namun, selain faktor-faktor itu, indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum (UM) juga mempunyai peranan yang signifikan.

TPT menggambarkan persentase tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, mencerminkan ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran angkatan kerja (Todaro, Michael P. dan Smith, 2020). Peningkatan TPT mampu mengurangi pendapatan masyarakat dan memperluas area kemiskinan (Yanthiani, 2023). Sebaliknya, UM adalah alat kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja berpenghasilan rendah, meningkatkan kemampuan membeli, dan mengurangi kemiskinan (International Labour Organisation - Geneva, 2019).

Dengan demikian, studi ini memasukkan variabel TPT dan UM ke dalam model kemiskinan, bersama variabel makroekonomi penting lainnya, untuk menganalisis dampaknya terhadap Garis Kemiskinan (GK) di Indonesia selama periode 2010–2016.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penting untuk melakukan analisis empiris yang secara simultan mengintegrasikan variabel Gini Ratio, garis kemiskinan (poverty line), inflasi, dan pertumbuhan PDB ke dalam satu model analitis untuk menilai pengaruh masing-masing variabel maupun kontribusi kolektifnya terhadap Garis Kemiskinan di Indonesia.

Dengan memanfaatkan data deret waktu (time-series) periode 2010–2023, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola hubungan yang lebih komprehensif, termasuk apakah ketimpangan pendapatan memperlambat atau bahkan meniadakan dampak positif pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan; apakah inflasi mengikis daya beli rumah tangga miskin sehingga meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi meskipun perekonomian mengalami ekspansi; apakah perubahan garis kemiskinan, yang merefleksikan dinamika kebutuhan hidup minimum dan harga aktual, memengaruhi komposisi maupun jumlah penduduk miskin; serta apakah keempat variabel tersebut, ketika dianalisis secara simultan, menghasilkan efek penurunan kemiskinan yang signifikan atau justru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memadai tanpa pemerataan distribusi dan stabilitas harga.

Dengan pendekatan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi bersifat analitis memberikan pemahaman tentang dinamika struktural di balik data kemiskinan nasional (Dollar & Kraay, 2002). Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi kebijakan publik, terutama dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan aspek pertumbuhan, ketimpangan, harga, dan kesejahteraan dasar (Ivanic & Martin, 2008).

Dalam melakukan analisis seperti ini, peneliti perlu memperhatikan bahwa data dari sumber berbeda dapat

menggunakan definisi kemiskinan dan garis kemiskinan yang berbeda. Misalnya, perbandingan antara data resmi nasional (BPS) dan data global seperti dari World Bank sering menunjukkan angka kemiskinan yang sangat berbeda, karena perbedaan metodologi dan standar garis kemiskinan global (poverty line PPP) vs lokal (Ausloos et al., 2019).

Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan secara eksplisit variabel kemiskinan dan garis kemiskinan yang digunakan dalam penelitian apakah kemiskinan absolut, relatif, atau menggunakan standar internasional serta mempertimbangkan pengaruh perbedaan metodologi apabila melakukan perbandingan longitudinal atau lintas sumber (Ausloos et al., 2019).

Kemiskinan di Indonesia bukan sekadar akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga terkait dengan distribusi pendapatan, stabilitas harga, serta jenis dan kualitas pertumbuhan. Kombinasi dari variabel-variabel makroekonomi seperti Gini Ratio, inflasi, PDB, dan definisi garis kemiskinan, bersama dengan data empiris jangka panjang, memungkinkan analisis mendalam atas faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pengentasan kemiskinan. Penelitian yang menggabungkan variabel-variabel tersebut secara simultan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman akademik dan perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan adil.

2. LANDASAN TEORI

Ketentuan Umum

Teori Gini Ratio Terhadap Kemiskinan, Gini Ratio dipakai untuk menilai level ketimpangan pendapatan dalam suatu negara dan berkaitan erat dengan kemiskinan. Teori Kuznets berpendapat bahwa di fase awal pembangunan, ketidaksetaraan meningkat, tetapi seiring perkembangan

ekonomi dan redistribusi pendapatan, ketidaksetaraan berkurang. Penelitian oleh Walujadi et al., (2022) menunjukkan bahwa disparitas pendapatan antardaerah di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak sejajar serta perbedaan dalam investasi dan pendidikan. Temuan serupa diungkapkan oleh Dartanto et al., (2017), yang menyebutkan bahwa transformasi struktur ekonomi dan urbanisasi memperbesar Gini Ratio serta memperlambat pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, distribusi pendapatan menjadi elemen krusial supaya pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Teori Inflasi Terhadap Kemiskinan, Inflasi berpengaruh langsung terhadap kemampuan beli masyarakat, terutama untuk kelompok berpendapatan rendah. Berdasarkan teori inflasi cost-push dan demand-pull, kenaikan harga barang kebutuhan tanpa peningkatan penghasilan akan memperburuk kemiskinan. Inflasi tinggi cenderung meningkatkan Garis Kemiskinan karena mengurangi pendapatan riil bagi masyarakat golongan miskin. Studi oleh Yolanda, (2017) menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia berdampak positif pada peningkatan kemiskinan dengan cara menurunkan daya beli dan memperluas kesenjangan sosial. Karena itu, kestabilan harga merupakan faktor utama dalam strategi pengurangan kemiskinan dan kebijakan makroekonomi yang berkelanjutan.

Teori Pertumbuhan GDP Terhadap kemiskinan,

pertumbuhan ekonomi atau Gross Domestic Product (GDP) adalah salah satu indikator utama pembangunan yang berdampak pada Garis Kemiskinan. Teori efek trickle-down menguraikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan jika manfaatnya dapat "mengalir" ke semua golongan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan peluang kerja. Menurut penelitian Soleh, (2015), pertumbuhan ekonomi Indonesia berhubungan negatif

dengan Garis Kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan GDP cenderung mengurangi jumlah penduduk miskin asalkan diiringi dengan distribusi pendapatan yang adil dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Akan tetapi, pertumbuhan yang berorientasi pada modal cenderung kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan karena keuntungan ekonominya terfokus pada segmen tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mencakup semua lapisan masyarakat merupakan faktor krusial dalam proses pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia.

Teori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan, berdasarkan teori Hukum Okun, terdapat hubungan terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran; pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran (Okun, 1962). Namun, jika pertumbuhan tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja (*jobless growth*), maka tingkat pengangguran tetap tinggi, sehingga kemiskinan tidak berkurang secara signifikan (Loayza & Raddatz, 2006). Penelitian empiris oleh (Yanthiani, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan TPT di Indonesia berdampak positif pada Garis Kemiskinan, khususnya di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tenaga kerja tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi TPT, semakin besar peluang peningkatan GK, karena pengangguran mengurangi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Teori Upah Minimum (UM) terhadap Kemiskinan, upah minimum merupakan kebijakan dari pemerintah untuk memastikan pekerja mendapatkan pendapatan yang memadai agar bisa hidup dengan menghormati martabat manusia (ILO, 2018). Menurut teori Pertumbuhan yang Dipicu oleh Upah, kenaikan upah dapat meningkatkan konsumsi total dan mendorong pertumbuhan ekonomi

(Stockhammer, 2017). Tetapi, teori Classical Labor Market berargumen bahwa upah minimum yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dan menyebabkan munculnya pengangguran baru (Garbarino et al., 1954). Dengan demikian, UM memiliki dampak ganda terhadap kemiskinan: Dampak positif (reduktif) jika kenaikan gaji meningkatkan daya beli tanpa mengurangi peluang kerja, Dampak negatif (inflatif) jika peningkatan gaji terlalu besar mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja.

Kerangka Konseptual Garis Kemiskinan, Gini Ratio, Inflasi dan Pertumbuhan GDP, kerangka konseptual penelitian ini menguraikan bahwa kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu garis kemiskinan, Gini Ratio, inflasi, dan pertumbuhan GDP. Garis kemiskinan mencerminkan batas minimum pengeluaran untuk kebutuhan dasar, sehingga jika terjadi kenaikan tanpa peningkatan pendapatan riil, jumlah penduduk miskin dapat meningkat. Gini Rasio menunjukkan ketidakKerataan dalam distribusi pendapatan, dengan nilai Gini yang lebih tinggi menandakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak merata. Di sisi lain, inflasi memiliki dampak dalam mengurangi daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama saat harga barang kebutuhan dasar melonjak. Sebaliknya, pertumbuhan GDP yang merata dapat mengurangi kemiskinan melalui pemerataan pendapatan dan produksi lapangan kerja yang berkualitas, sehingga keempat variabel itu saling berhubungan dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi

Penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2018) menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan pertumbuhan yang pro-

kemiskinan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan penurunan kemiskinan ketika Gini Ratio melebihi 0,37, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan menghalangi keuntungan pertumbuhan untuk masyarakat miskin. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif agar keuntungan ekonomi dapat didistribusikan secara merata. Studi ini menekankan signifikansi pengendalian ketimpangan dalam mendukung efektivitas pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan.

Penelitian oleh Aureli & Juliprijanto (2022) meneliti dampak ketidakefektifan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 1992–2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada kemiskinan, sedangkan ketidakefektifan pendapatan berdampak positif. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, tetapi kenaikan Gini Ratio bisa memperlambat proses itu. Oleh karena itu, distribusi pendapatan menjadi aspek krusial agar pertumbuhan ekonomi lebih efisien dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh van Leeuwen & Földvári (2016) mengevaluasi evolusi ketidaksetaraan dan kemiskinan di Indonesia selama rentang waktu yang panjang 1932–2008. Mereka mengamati bahwa walaupun Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang cepat di era modern, tingkat kesenjangan pendapatan masih tinggi dan menghalangi penurunan angka kemiskinan. Faktor-faktor seperti variasi daerah dan akses terhadap pendidikan menjadi penyebab utama ketidaksetaraan itu. Penelitian ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi pemerataan sosial akan menghasilkan

situasi *growth without equity*, di mana Garis Kemiskinan masih tinggi meskipun GDP bertambah.

Selanjutnya, penelitian dari Yolanda (2017) menganalisis dampak inflasi terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inflasi berdampak positif pada kemiskinan karena peningkatan harga barang pokok mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, inflasi yang tinggi turut menghambat kemajuan indeks pembangunan manusia karena berkurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini mendukung pandangan bahwa pengendalian inflasi adalah elemen krusial dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, studi terbaru oleh Ramadhan & Pertiwi (2025) mengevaluasi dampak Gini Ratio dan inflasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan inflasi yang terkendali dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi Gini Ratio yang tinggi justru menurunkan kualitas hidup masyarakat karena memperbesar kesenjangan sosial. Studi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan berperan penting tidak hanya dalam menurunkan kemiskinan, tetapi juga dalam meningkatkan pembangunan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, keadilan sosial dan stabilitas ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

3. METODOLOGI

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh garis kemiskinan, Gini Ratio, inflasi, dan pertumbuhan GDP terhadap Garis Kemiskinan di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu (time series) selama periode 2010–2023, yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga ekonomi internasional seperti World Bank.

Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan empat variabel independen, dengan pengertian sebagai berikut: a) Garis Kemiskinan (Y): Jumlah pengeluaran terendah untuk mencukupi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan (rupiah per orang per bulan). Peningkatan garis kemiskinan tanpa bertambahnya pendapatan akan meningkatkan jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan. b) Gini Ratio (X_1): Ukuran ketidakekadilan pendapatan, memiliki rentang 0–1. Semakin besar angkanya, semakin tinggi ketidakekadilan distribusi pendapatan. c) Inflasi (X_2): Persentase perubahan harga per tahun yang berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis oleh BPS. Kenaikan inflasi mengurangi kemampuan beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertumbuhan GDP (X_3): Persentase tahunan dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil. Pertumbuhan ekonomi yang pesat biasanya berkemampuan untuk menurunkan Garis Kemiskinan jika disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka (X_4): Persentase orang yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak memiliki pekerjaan TPT menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan TPT dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan menunjukkan penurunan pasar kerja.

Upah Minimum (X_5): Upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah provinsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja. Kenaikan upah minimum yang tidak diikuti peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan

kenaikan biaya produksi dan inflasi, yang berpotensi menaikkan garis kemiskinan.

Model Analisis

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda: $GK_t = \beta_1 GR_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 GDP_t + \beta_4 TPT_t + \beta_5 UM_t + \varepsilon_t$.
Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan (Rupiah per Kapita per Bulan)

GR = Gini Ratio (Presentase)

INF = Inflasi (Presentase)

GDP = Pertumbuhan Ekonomi (Presentase)

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (Presentase)

UM = Upah Minimum (Rupiah)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi

ε_t = error term

Teknik Analisis

Analisis data dilaksanakan menggunakan perangkat lunak statistik seperti EViews atau SPSS melalui langkah-langkah berikut: a) Uji Asumsi Klasik: terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. b) Uji F (simultan): untuk mengidentifikasi apakah semua variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GK. c) Uji t (parsial): untuk mengetahui dampak setiap variabel independen terhadap GK. d) Koefisien Determinasi (R^2): untuk mengukur rasio variasi Garis Kemiskinan yang diungkapkan oleh model.

Interpretasi Hasil

Hasil regresi akan menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh setiap variabel terhadap kemiskinan. a) Koefisien positif

($\beta > 0$) menunjukkan bahwa peningkatan variabel tersebut cenderung meningkatkan kemiskinan (GK). b) Koefisien negatif ($\beta < 0$) menunjukkan bahwa peningkatan variabel tersebut cenderung menurunkan kemiskinan (GK).

berpengaruh signifikan terhadap garis kemiskinan secara bersamaan.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 12/10/25 Time: 12:38			
Sample: 2010 2023			
Included observations: 14			
Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	8.43E+10	2941.441	NA
GR	29478374	1382.443	1.809853
INF	11321464	8.902260	1.816686
GDP	18791499	17.21252	2.594996
TPT	2.66E+08	342.0783	3.352391
UM	0.000260	37.38624	3.793278

Table 2 Uji Multikolinearitas

Tidak ada gejala multikolinearitas serius, dan nilai VIF seluruh variabel berada di bawah 10, yaitu berkisar antara 1,8 dan 3,7. Artinya, antarvariabel independen tidak saling berkorelasi kuat satu sama lain.

b) Uji Autokorelasi

Dependent Variable: GK				
Method: Least Squares				
Date: 12/10/25 Time: 12:37				
Sample: 2010 2023				
Included observations: 14				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-115542.7	290333.6	-0.397965	0.7011
GR	1231.482	5429.356	0.226817	0.8263
INF	540.6843	3364.733	0.160651	0.8783
GDP	-607.8238	4334.916	-0.140216	0.8920
TPT	19481.23	18308.11	1.103493	0.2886
UM	0.166591	0.016132	10.32654	0.0000
R-squared	0.978128	Mean dependent var	355693.9	
Adjusted R-squared	0.964465	S.D. dependent var	106048.9	
S.E. of regression	20030.01	Akaike info criterion	22.54536	
Sum squared resid	3.21E+06	Schwarz criterion	23.21626	
Log likelihood	-154.6176	Hannan-Quinn criter.	22.62003	
F-statistic	71.55786	Durbin-Watson stat	1.480765	
Prob(F-statistic)	0.000002			

**Table 1 Regresi Model
Ekonometrika**

Sebuah nilai R-squared sebesar 0,9781 menunjukkan bahwa variabel GR, INF, GDP, TPT, dan UM menyumbang sekitar 97,81% dari variasi garis kemiskinan. Nilai F-statistic sebesar 71.55 dengan probabilitas 0.000002 menunjukkan bahwa semua variabel independen

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	0.363466	Prob. F(2,6)	0.7096
Obs*R-squared	1.512881	Prob. Chi-Square(2)	0.4693

Table 3 Uji Autokorelasi (Breusch–Godfrey)

Menurut Tes Breusch–Godfrey LM, nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.4693 (lebih dari 0.05) menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.213803	Prob. F(5,8)	0.1520
Obs*R-squared	8.126597	Prob. Chi-Square(5)	0.1494
Scaled explained SS	2.108716	Prob. Chi-Square(5)	0.8339

Table 4 Uji Heteroskedastisitas (White)

Hasil Tes White menunjukkan bahwa model tidak mengandung heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi, dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.1494 (lebih dari 0.05).

d) Uji Normalitas

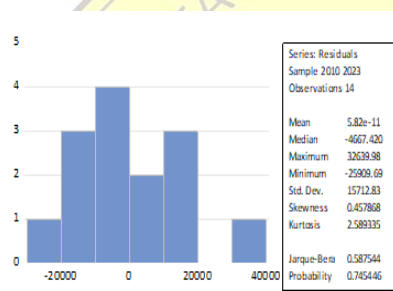


Table 5 Uji Normalitas (Jarque-Bera)

Karena probabilitas JB lebih besar dari 0,05, nilai Jarque-Bera (JB) menunjukkan bahwa distribusi residual normal.

e) Uji Ramsey RESET

	Value	df	Probability
t-statistic	3.427000	7	0.0110
F-statistic	11.74433	(1, 7)	0.0110
Likelihood ratio	13.78974	1	0.0002

Table 6 Uji Spesifikasi Model

Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0110 menunjukkan bahwa ada kemungkinan variabel penting yang belum dimasukkan ke dalam model. Namun, karena R² dan F-statistik model

utama tetap tinggi, model masih dapat dianggap valid untuk analisis deskriptif.

Pembahasan Hasil Regresi, a)

Pengaruh Gini Ratio (GR) terhadap Garis Kemiskinan

Menurut koefisien GR sebesar 1231.482, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan garis kemiskinan sebesar 1.231 orang, dengan asumsi garis kemiskinan per satuan rupiah. Hasilnya tidak signifikan secara statistik ($p = 0,8263$), meskipun arah hubungan positif ini bertentangan dengan teori ekonomi pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2010 hingga 2023 tidak inklusif dan tidak menguntungkan orang-orang berpendapatan rendah. Seperti yang dinyatakan oleh David Dollar & Kraay, (2002), pertumbuhan ekonomi hanya dapat menurunkan kemiskinan ketika ada pemerataan pendapatan. Pengaruh Inflasi (INF) terhadap Garis Kemiskinan. Sebagai hasil dari koefisien INF sebesar 540.684, setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan meningkatkan garis kemiskinan sebesar 540,68 satuan. Tetapi pengaruh ini tidak signifikan juga ($p = 0,8763$). Inflasi secara teoritis meningkatkan kemiskinan dengan menurunkan daya beli orang berpenghasilan rendah (Easterly & Fischer, 2000). Hasil positif ini sesuai dengan teori, tetapi tidak signifikan

karena inflasi di Indonesia selama periode analisis relatif stabil dan tidak menekan konsumsi rumah tangga miskin secara ekstrem. b) Pengaruh Produk Domestik Bruto (GDP) terhadap Garis Kemiskinan Koefisien GDP sebesar -0,607,238 menunjukkan bahwa setiap kenaikan GDP per kapita sebesar 1 satuan akan menurunkan garis kemiskinan sebesar 607,82 satuan. Nilai ini, bagaimanapun, tidak signifikan ($p = 0,8920$).

Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB belum cukup untuk mengurangi kemiskinan secara langsung. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada sektor formal dan wilayah perkotaan. Menurut Todaro, Michael P. dan Smith, (2020), kemiskinan seringkali tidak dapat diatasi melalui pertumbuhan tanpa pemerataan, yang dikenal sebagai pertumbuhan yang tidak memadai atau tanpa pekerjaan. c) Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan Koefisien TPT adalah 19,461,23, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% pada TPT akan meningkatkan garis kemiskinan sebesar 19,461,23 satuan. Arah positif ini sejalan dengan teori bahwa meningkatnya pengangguran menurunkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan. Studi Yanthiani, (2023) menunjukkan bahwa pengangguran

meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia, tetapi temuan ini mendukungnya ($p = 0.2669$). Ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan lapangan kerja yang menghasilkan uang untuk mengakhiri kemiskinan. d) Pengaruh Upah Minimum (UM) terhadap Kemiskinan Garis kemiskinan akan meningkat sebesar Rp0,1666 dengan koefisien UM 0,1666 dan signifikan ($p = 0.0000$). Dengan kata lain, jika upah minimum naik Rp100.000, garis kemiskinan akan meningkat sekitar Rp16.660. Hasil ini menunjukkan bahwa karena kenaikan upah minimum memicu kenaikan harga-harga dan biaya hidup, atau inflation cost-push, kenaikan upah minimum cenderung menaikkan garis kemiskinan. Ini juga dapat terjadi ketika kenaikan upah minimum tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hasil ini sejalan dengan Stockhammer, (2017), yang menekankan bahwa agar kebijakan upah tidak berdampak negatif terhadap kemiskinan, strategi peningkatan efisiensi tenaga kerja harus disertakan dengan kebijakan upah. e) Interpretasi Umum, Dari kelima variabel independen, hanya Upah Minimum (UM) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap garis kemiskinan di Indonesia. Variabel GR, INF, GDP, dan TPT menunjukkan arah sesuai teori, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan

pada taraf 5%. Artinya, tanpa kebijakan pemerataan pendapatan dan penciptaan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran di Indonesia belum cukup efektif. Sebaliknya, dinamika kebijakan upah dan biaya hidup lebih banyak memengaruhi penurunan kemiskinan dibandingkan dengan indikator makroekonomi umum.

5. KESIMPULAN

Hasil estimasi regresi linier berganda menunjukkan bahwa selama periode 2010–2023, hanya Upah Minimum (UM) yang berpengaruh signifikan terhadap Garis Kemiskinan di Indonesia, dengan koefisien positif ($p = 0,0000$), mengindikasikan bahwa kenaikan UM justru mendorong kenaikan garis kemiskinan—kemungkinan melalui cost-push inflation. Sementara itu, variabel Gini Ratio, inflasi, GDP, dan TPT tidak signifikan meskipun arah hubungannya sesuai teori, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro selama periode tersebut belum cukup inklusif untuk menurunkan tekanan pada garis kemiskinan. Dengan demikian, dinamika kemiskinan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kebijakan upah dan struktur biaya hidup daripada indikator makroekonomi konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Ausloos, M., Eskandary, A., Kaur, P., & Dhesi, G. (2019). Evidence for Gross Domestic Product growth time delay dependence over Foreign Direct Investment. A time-lag dependent correlation study. *Physica A: Statistical Mechanics and Its*

Applications, 527, 121181.

<https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121181>

Badan Pusat Statistik. (2006–2023). *Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia, 2006–2023*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2019–2024). *Statistik Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia*. BPS / Indonesia Investments.

Badan Pusat Statistik. (2025). Garis Kemiskinan nasional & gini ratio. BPS Press Release.

Deininger, K., & Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: inequality and growth. *Journal of Development Economics*, 57(2), 259–287. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(98\)00099-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00099-6)

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>

Easterly, W., & Fischer, S. (2001). Inflation and the Poor. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(2), 160. <https://doi.org/10.2307/2673879>

Fosu, A. K. (2010). Inequality, Income, and Poverty: Comparative Global Evidence *. *Social Science Quarterly*, 91(5), 1432–1446. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2010.00739.x>

Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries 1. *Agricultural Economics*, 39(s1), 405–416. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x>

Loayza, N. V., & Raddatz, C. (2010). The composition of growth matters for poverty

- alleviation. *Journal of Development Economics*, 93(1), 137–151. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.03.008>
- Aureli, S. R., & Juliprijanto, W. (2022). Influence of Income Inequality, Economic Growth, Unemployment on Indonesian Poverty in 1992-2019. *Marginal: Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 2(1), 51–67. <https://doi.org/10.55047/marginal.v2i1.354>
- Dartanto, T., Yuan, E. Z. W., & Sofiyandi, Y. (2017). Two Decades of Structural Transformation And Dynamics of Income Equality in Indonesia. *Asian Development Bank Institute*, 783, 1–23.
- David Dollar, & Kraay, A. (2002). Growth Is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Easterly, W., & Fischer, S. (2000). Inflation and the Poor. *Inflation and the Poor*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-2335>
- Fosu, A. K. (2010). Inequality, income, and poverty: Comparative global evidence. *Social Science Quarterly*, 91(5), 1432–1446. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2010.00739.x>
- Garbarino, J. W., Davis, P., & Matchett, G. J. (1954). Modern Labor Economics. *Industrial and Labor Relations Review*, 8(1), 132. <https://doi.org/10.2307/2519307>
- ILO. (2018). Global wage report 2018/19: What lies behind the gender pay gaps. *International Labour Organization*, 159. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
- International Labour Organisation - Geneva. (2019). *What lies behind gender pay gaps*.
- Loayza, N. V., & Raddatz, C. (2006). The Composition Of Growth Matters For Poverty Alleviation. *The Composition Of Growth Matters For Poverty Alleviation*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4077>
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP, its measurement and significance. *Business and Economics Statistics Section of the American Statistical Association*, 1–7. <http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p01b/p0190.pdf>
- Permadi, Y. A. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i02.p08>
- Ramadhan, R., & Pertiwi, I. D. (2025). The influence of the gini ratio and inflation on the Human Development Index (HDI). *Priviet Social Sciences Journal*, 5(9), 253–261. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.721>
- Soleh, A. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>
- Stockhammer, E. (2017). Wage-led versus profit-led demand: What have we learned? A Kaleckian–Minskyan view. *Review of Keynesian Economics*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.4337/roke.2017.01.03>

Todaro, Michael P. dan Smith, S. C. (2020).
Economic Development, 13th edition.
<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/economic-development/P200000005609/9781292453323>

van Leeuwen, B., & Földvári, P. (2016). The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 379–402. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1184226>

Walujadi, D., Indupurnahayu, I., & Endri, E. (2022). Determinants of Income Inequality Among Provinces: Panel Data Evidence from Indonesia. *Quality - Access to Success*, 23(190), 243–250. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.26>

Yanthiani, L. (2023). The Impact of Unemployment on the Economy in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.15575/jieb.v2i2.21310>

Yolanda, Y. (2017). Analysis of factors affecting inflation and its impact on human development index and poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4), 38–56. <https://doi.org/10.35808/ersj/873>